

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Melalui Motivasi Kerja

Abdul Rajab¹, Erwin Lessy², Muhammad Syafruddin³, Nurlaely Razak⁴, Muhammad Tafsir⁵

^{1,2,3,4,5} Manajemen, STIEM Bongaya Makassar

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Perbandingan Kinerja keuangan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan alat uji *paired Sample t-test*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan langsung melalui wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini dokumen laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo. Populasi dalam Penelitian Ini adalah laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo 2018-2021. Sampel Non probability sampling tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo 2018-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic Covid-19 dilihat dari rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio Efektivitas, rasio Efisiensi.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; Pandemi Covid-19; kemandirian keuangan, ketergantungan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas, Efisiensi

Copyright (c) 2023 Siti Nur Hasanah Asiku

 Corresponding author :

Email Address : nur.asiku01@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap Pemerintah daerah baik itu yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun sesuai aturan yang berlaku untuk dinilai keberhasilan atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan untuk melihat dan menilai kinerja pengelolaan keuangannya dalam kurun waktu tertentu. Di mana analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil dari analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016).

Menurut (Amstrong, 1998) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah

tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Salah satu bentuk dari pengukuran kinerja adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan APBD.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah. APBD juga memiliki fungsi penting bagi pemerintah diantaranya yaitu, sebagai sarana dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, sebagai sarana untuk mewujudkan otonomi daerah, sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah pada masyarakatnya dalam segala kegiatan dan hasil kinerja pemerintah selama periode tertentu, sebagai sarana untuk mengontrol dan mengawasi perkembangan pada daerah disetiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya, sebagai pencegahan terjadinya kebocoran anggaran, serta sebagai alat untuk pengambilan keputusan public (Rheswari & Akbar, 2022).

Pengukuran APBD akan di buat Pemerintah Daerah setelah masa periode anggaran berakhir pengukuran ini merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD. Salah satu Teknik yang paling banyak digunakan yaitu analisis rasio keuangan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi Kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 dan hanya dalam waktu satu bulan seluruh provinsi telah melaporkan kejadian kasus COVID-19 di wilayahnya masing- masing.

Menurut (Mahmudi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kinerja keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berkaitan dengan Edaran peraturan wali kota Gorontalo Nomo 12 tahun 2019 Pelaksanaan pembatasan social berskala besar dalam penanganan Corona Virus *Diasease* 2019 (Covid 19) Di Kota Gorontalo. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dalam mengelolah keuangan daerah termasuk Kota Gorontalo melalui APBD sebagai instrumen kebijakan Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tergambar melalui penilaian kinerja keuangan daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di negara kita, masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Di era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Yamali & Putri, 2020).

Untuk mengatasi keadaan penurunan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan Penanganan Covid 19 yang tertuang dalam peraturan mentri dalam negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan *Coronavirus Diasease* 2019 di lingkungan pemerintah daerah serta instruksi presiden Nomor 4 tahun 2020

tentang *Refocusing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019. Berdasarkan permendagri ini, rencana keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja APBD di fokuskan pada penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Yang Menetapkan Kebijakan Keuangan Negara Dan Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Salah Satuunya Adalah Kebijakan Keuangan Daerah.

Masyarakat sebagai (*principal*) berkepentingan dalam mengetahui pengelolaan atau penggunaan dari dana yang di Kelola oleh Pemerintah (*agent*), karena tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah sendiri adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah setempat, pengukuran kinerja pemerintah harus fokus pada target dan sasaran program kerja yang dibuat sehingga diharapkan meningkatnya efisiensi penyediaan layanan publik, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan dalam mewujudkan akuntabilitas public (Farida & Nugraha, 2019).

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah Provinsi Gorontalo luas wilayah 64,79 km² atau sekitar 0,53% dari luas Provinsi yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, dengan 50 (lima puluh) kelurahan. Kota gorontalo ini terkenal dengan sektor jasa dan perdagangan. Di tahun 2020 Dampak pandemic covid 19 di Kota Gorontalo sangat terasa, ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan sangatlah mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan. Berbagai sektor mengalami penurunan pendapatan dan bahkan beberapa UMKM harus menutup usaha karena mengalami kebangkrutan.

Penurunan pendapatan masyarakat tentu akan berdampak pula pada keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah terutama dalam sektor pendapatan pajak daerah. Sebab pajak daerah merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian pemerintah daerah. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah kota gorontalo adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap anggaran yang di tetapkan dan dilaksanakan.

Data dari badan keuangan kota gorontalo di tahun 2018 APBD dianggarkan lebih kurang 1,2 Triliun dengan kontribusi PAD sebesar Rp200-an miliar, namun di tahun 2020 PAD sempat terjadi penurunan pendapatan, termasuk dana transfer berupa DAU, DAK, dan dana transfer lainnya bahkan mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat.

Berikut Data Laporan Keuangan Kota Gorontalo 4 (empat) tahun terakhir yakni 2018 sd 2020 Pada Kondisi Sebelum Covid Penulis Mengambil data tahun amatan di mulai dari tahun 2018-2019 karena data tersebut yang lebih dekat Kinerja keuangan Dimasa Pandemi. Dan Pada Saat Covid Peneliti Mengambil tahun amatan di tahun 2020-2021 karena di tahun 2022 Kinerja pemerintah kota Gorontalo sudah masuk pada era New normal, Sehingga data yang di ambil tersebut sudah cukup terpadu.

Tabel 1. Daftar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Gorontalo

Kondisi	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sebelum Covid	2018	220.343.322.064,00	193.669.456.785,40	87.89
Sebelum Covid	2019	234.085.938.965,00	217.583.653.390,81	92.95
Saat Covid	2020	246.960.765.850,00	237.696.699.749,55	96.25
Saat Covid	2021	260.847.905.850,00	297.332.050.502,77	113.99
Rata-Rata				91.21

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo, 2018 sd 2021

Melalui tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan daerah Kota di Gorontalo cukup bervariasi terdapat penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tabel satu tersebut bahwa rata-rata pencapaian target penerimaan daerah berkisar lebih kurang 92,21 %.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja daerah, olehnya naik turunnya PAD berpengaruh terhadap belanja daerah itu sendiri. Belanja daerah memberikan *multiflaer efek* terhadap transaksi keuangan daerah yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga covid19 akan berdampak pada perekonomian daerah yang berpengaruh secara siklus terhadap pendapatan Asli Daerah.

Penelitian tentang Analisis Laporan keuangan telah banyak dilakukan diantaranya Menurut penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh (Donny, 2020) menjelaskan bahwa di Indonesia di prediksi terjadi penurunan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan diantaranya 78% BLU Kesehatan, 46% BLU Pendidikan, dan 47% BLU Lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Anjelia et al., 2021) mendeskripsikan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan daripada kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tak signifikan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dimana Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2018 - 2021 yaitu menghitung rasio-rasio keuangan dan menganalisis serta mendeskripsikan hasil penghitungan rasio. Objek dari penelitian ini adalah kinerja Keuangan Pemerintah kota gorontalo. Kinerja keuangan di tinjau dari RasioKemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan KeuanganDaerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio EfektivitasPAD, Rasio Efisiensi PAD, data diperoleh dari laporan keuangan kota gorontalodalam hal ini badan keuangan kota gorontalo. Menurut Sugiyono (2020) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam Penelitian Ini adalah laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo 2018-2021. Menurut Sugiyono (2018:136) Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo Periode 2018-2021. Analisis yang digunakan adalah analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan uji-t yang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak (*software*) *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*

HASIL DAN PEMBAHASAN

uji Normalitas Data

1. Rasio Kemandirian

Hasil pengujian normalitas data untuk Rasio Kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Rasio Kemandirian

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Kemandirian	.377	4	.	.795	4	.093

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Shapiro-Wilk* untuk data Rasio Kemandirian sebesar 0,795 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,093 yang berarti berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Rasio Kemandirian telah berdistribusi normal.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil pengujian normalitas data untuk data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 . Hasil Uji Normalitas Data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Ketergantungan Keu. Daerah	.239	4	.	.926	4	.574

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Shapiro-Wilk* untuk data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 0,926 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,574 yang berarti berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah telah berdistribusi normal.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil pengujian normalitas data untuk data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Derajat Desentralisasi Fiskal	.236	4	.	.943	4	.671
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Shapiro-Wilk* untuk data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 0,943 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,671 yang berarti berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal telah berdistribusi normal.

4. Rasio Efektivitas

Hasil pengujian normalitas data untuk data Rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data Rasio Efektivitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Efektivitas	.325	4	.	.796	4	.096
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Shapiro-Wilk* untuk data Rasio Efektivitas sebesar 0,796 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,096 yang berarti berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Rasio Efektivitas telah berdistribusi normal.

5. Rasio Efisiensi

Hasil pengujian normalitas data untuk data Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data Rasio Efisiensi

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rasio Efisiensi	.315	4	.	.868	4	.290
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *Shapiro-Wilk* untuk data Rasio Efisiensi sebesar 0,868 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,290 yang berarti berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Rasio Efisiensi telah berdistribusi normal.

Uji Dua Sampel Berhubungan (Uji Paired Sample t-test)

1. Rasio Kemandirian

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan Rasio Kemandirian.

Ho = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio kemandirian sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

H1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio kemandirian sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil analisis diringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji Rasio Kemandirian

		Paired Samples Test					
		Paired Differences			t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Pandemi Covid-19	-5.60000	5.23259	3.70000	-1.514	1	.372

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi 0,372 yang berarti masih lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang digunakan ($0,372 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio kemandirian sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Ho = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

H1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil analisis diringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

		Paired Samples Test					
		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Pandemi Covid-19	1.13500	3.03349	2.14500	.529	1	.690

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi 0,690 yang berarti masih lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang digunakan ($0,690 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Ho = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

H1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil analisis diringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan

Paired Samples Test							
		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Pandemi Covid-19	-5.92000	1.32936	.94000	-6.298	1	.100

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi 0,100 yang berarti masih lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang digunakan ($0,100 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio derajat desentralisasi sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Rasio Efektivitas

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan Efektivitas.

Ho = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efektivitas sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

H1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efektivitas sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil analisis diringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Hasil Uji Rasio Efektivitas

Paired Samples Test							
		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Pandemi Covid-19	-9.88000	15.78262	11.16000	-.885	1	.539

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi 0,539 yang berarti lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang digunakan ($0,539 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efektivitas sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

5. Rasio Efisiensi

Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan Rasio Efisiensi.

H_0 = Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efisiensi sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

H_1 = Terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efisiensi sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

Pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Hasil analisis diringkas pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 . Hasil Uji Rasio Efisiensi

Paired Samples Test							
		Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Pandemi Covid-19	-.88500	.98288	.69500	-1.273	1	.424

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan uji *paired sample t-test* diperoleh nilai signifikansi 0,424 yang berarti lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang digunakan ($0,424 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menggunakan rasio efisiensi sebelum dan saat masa pandemi Covid-19.

SIMPULAN

1. Pada Rasio Kemandirian tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan Saat Pandemi pada pemerintah Kota Gorontalo Periode tahun (2018-2021) jika diproksi dalam pendapatan asli daerah dan transfer pusat atau provinsi dan pinjaman.
2. Pada rasio ketergantungan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan Saat Pandemi pada pemerintah Kota Gorontalo Periode tahun (2018-2021) jika diproksi dalam pendapatan transfer dan total penerimaan Daerah.
3. Pada rasio Derajat Desentralisasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan Saat Pandemi pada pemerintah Kota Gorontalo Periode tahun (2018-2021) jika diproksi dalam pendapatan Asli Daerah dan total penerimaan Daerah.
4. Pada rasio Efektivitas PAD tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan Saat Pandemi pada pemerintah Kota Gorontalo Periode tahun (2018-2021) jika diproksi dalam realisasi penerimaan PAD dan Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan.

5. Pada Rasio Efisien. tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan Saat Pandemi pada pemerintah Kota Gorontalo Periode tahun (2018-2021) jika diproksi dalam Biaya Perolehan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD.

Referensi :

- Abdullah, S., Zam-Zam, I., & Suwito, S. (2022). The Financial Performance Of Ternate City's Government: Analysis Before And During The Pandemic Covid-19. *Economics, Business, Accounting & Society Review*, 1(3), 152-159. <https://doi.org/10.55980/Ebasr.V1i3.36>
- Amstrong, M. A. B. (1998). *Performance Management*. In London Institute Of Pesonel Development.
- Anjelia, O., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35097/32880>
- Bastian; Indra, Saat, S., & Yati Sumiharti. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Cahyadi, C. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bpkad Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1, 1-18.
- Donny, M. P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Layanan Badan Layanan Umum Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 1(1), 51-67. <https://doi.org/10.33105/jmp.V1i1.344>
- Fadhilah, A. (2022). Analisis Keuangan Pemerintah Kota Bandung Pada Masa Sebelum Pandemi Dan Pasca Pandemi COVID-19. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 438-445. <https://doi.org/10.29313/bcses.V2i2.4434>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107-124. <https://doi.org/10.15575/jpan.V11i2.7644>
- Fitri, & Kiswara, E. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Kesehatan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(2), 1-8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ghina Shinta Wulaning Asri. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. 1-23.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, And Ownership Structure. *The Economic Nature Of The Firm: A Reader*, Third Edition, 283-303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Halim, Abdul, dkk. 2012, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat. Jakarta
- Suliyanto. (2005). Metode Riset Bisnis, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, hlm.131
- Mia Ardhi Nur Afifa & Nuwun Priyono. (2023). Comparative Analysis Of Regional Financial Covid-19 Pandemic District / City In Central Java. Finance, General Issues, International Economic, 2(2), 403–415.
- Donaldson, & Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 49-65.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Gorontalo
- peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan Coronavirus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah
- Putra, Windhyu. 2018. "Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah". Depok. Rajawali Press.
- Natasha. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
- Nadila, Patra, A. D. A., & Sari, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V4i6.1442>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September, 408–425.
- Sayadi, M. H. M. B. U. R. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Pemerintah Daerah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Muhammad. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(02), 1–6.
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.56127/Jekma.V1i2.154>
- Vebiani, D., Nugraha, & Hardiana, R. D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat). Fineteach: Journal Of Finance ..., 1(1), 113–126.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/48137>
<https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/download/48137/19563>

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 384.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>